



2022

Komisi VI

Accountability Paper

Menjaga Kesinambungan Kinerja Positif Ekspor Indonesia Pada Komoditas Pakaian Jadi dari Tekstil

Tim Komisi VI, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara

Indah Pranchiska
Teuku Surya Darma
Hamas Wuryantina

Abstrak:

Kinerja positif ekspor Indonesia yang ditunjukkan dengan surplus neraca perdagangan selama 29 bulan terakhir ini hingga September 2022 berkontribusi besar dalam mempertahankan tren perekonomian Indonesia tumbuh secara positif. Meskipun kondisi ekonomi global penuh ketidakpastian, terutama terjadinya perlambatan ekonomi pada kedua negara mitra dagang terbesar Indonesia yaitu Tiongkok-Amerika Serikat. Tentunya capaian positif atas perdagangan internasional tersebut perlu dijaga kesinambungannya dengan fokus pada kegiatan industri bernilai tambah tinggi melalui pengembangan komoditas strategis Nonmigas, khususnya komoditas pakaian jadi (konveksi) dari tekstil yang telah ditetapkan sebagai industri strategis nasional yang menjalankan fungsi untuk tidak hanya menghasilkan devisa negara, namun tergolong industri padat karya yang secara paralel menjalankan fungsi 'jaring pengaman sosial' dari sisi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun seiring tren positif dan konsisten mengalami peningkatan nilai ekspor, pengembangan atas industri pakaian jadi dari tekstil ini masih menghadapi kendala, di antaranya mengenai ketergantungan impor bahan baku serta daya saing harga yang rendah sejalan dengan diversifikasi dan *branding* produk yang belum optimal dan teknologi pada mesin produksi yang relatif telah usang. Untuk itu, langkah strategis Pemerintah dalam menyelesaikan kendala yang timbul adalah sebuah keharusan, di antaranya dengan memfasilitasi pemanfaatan teknologi *platform* berbasis 4.0 pada industri garmen dengan dukungan akses terhadap bahan baku melalui konektivitas industri hulu-antara-hilir tekstil. Selain itu, meningkatkan peran perwakilan perdagangan untuk memperkuat analisis pasar internasional dan meningkatkan diplomasi ekonomi ke berbagai negara tujuan ekspor dalam rangka memperluas akses pasar. Tidak kalah pentingnya adalah pengembangan alih teknologi dan penguatan vokasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai kekuatan industrialisasi di Indonesia.

Kata Kunci: Ekspor, Nonmigas, Pakaian Jadi, Tekstil

Adalah sebuah keniscayaan bagi sebuah negara untuk menyusun langkah strategis dalam bentuk kebijakan ekonomi yang mampu beradaptasi pada kondisi global yang penuh ketidakpastian saat ini. Di antaranya, kebijakan yang mampu mempertahankan tren perekonomian yang tumbuh positif melalui surplus neraca perdagangan yang dihasilkan dari produktivitas sektor industri pada komoditas unggulan berdaya saing ekspor.

Secara khusus, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian banyak negara di ASEAN ketika menentukan langkah kebijakan ekonominya, terutama bagi negara Mitra Dagang Tiongkok-Amerika Serikat untuk merespon atas perlambatan¹ ekonomi di kedua negara tersebut pada saat ini. Lebih khusus bagi Indonesia, dimana kedua negara tersebut tercatat minimal selama tiga tahun terakhir menjadi negara tujuan ekspor (FOB) terbesar. Seperti tercatat pada tahun 2021 nilai perdagangan yang dilakukan dengan Tiongkok mencapai 23,21% dan dengan Amerika Serikat mencapai 11,14% (BPS, 2022)².

Namun menariknya, berbagai peristiwa ekonomi maupun politik yang terjadi di antara Amerika Serikat dan Tiongkok tidak selalu membawa pengaruh negatif terhadap perekonomian negara-negara Mitra Dagang kedua negara tersebut. Seperti hasil penelitian Mutiara Sari, Marselina, & Neli Aida (2021)³ menjelaskan bahwa terjadinya 'Perang Dagang' AS-Tiongkok berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja ekspor bagi mitra dagang kedua negara tersebut (10 negara yang dijadikan sampling), ketika negara-negara tersebut mampu memanfaatkan kesempatan di antaranya dengan mendiversifikasi negara tujuan perdagangan dan mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Pada konteks Indonesia, dengan sumber daya alam yang relatif masih terjaga dan surplus demografi sejatinya menjadi modal Pemerintah untuk menghadirkan iklim investasi yang saling menguntungkan dan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dimasa ketidakpastian ekonomi global. Hal tersebut tentunya harus disertai dengan tetap menjaga komitmen pembangunan ekonomi yang produktif dan berkelanjutan melalui pendekatan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan optimalisasi pengembangan teknologi. Dengan itu, Indonesia boleh disebut sebagai negara yang memiliki kekuatan dan berperan penting dalam perdagangan internasional di masa mendatang.

Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Klaus Schwab (Tempo, 2019: 40)⁴ yang menjelaskan bahwa, *"hanya negara yang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik yang bisa menjadi kekuatan global. Sebaliknya, mereka yang tidak siap dan sibuk sendiri dengan urusan domestik tak akan mampu bersaing dan se makin tertinggal".*

Sekilas Neraca Perdagangan Indonesia

Merujuk pada data yang dirilis dari laman resmi BPS (<https://www.bps.go.id/exim/>), memperlihatkan bahwa transaksi perdagangan ekspor-impor Indonesia secara tahunan memiliki tren surplus dengan total sebesar USD21.62 miliar pada tahun 2020, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi USD35.42 miliar. Bahkan peningkatan surplus perdagangan juga terjadi pada tahun 2022 yaitu sampai dengan bulan September tercatat sebesar USD39.84 miliar.

¹ Disampaikan James Walsh selaku IMF *Senior Resident Representative for Indonesia* saat kuliah umum kepada peserta PPRA 63 dan 64 Lemhannas RI di Auditorium Gajah Mada, Gedung Pancagatra Lemhannas RI. Diakses dari <https://www.lemhannas.go.id/index.php/publikasi/press-release/1627-mitra-dagang-terbesar-indonesia-as-dan-china-sedang-alami-perlambatan-ekonomi-2>.

² Diakses dari <https://www.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1010/nilai-ekspor-menurut-negara-tujuan-utama-nilai-fob-juta-us-2000-2021.html>

³ Penelitian dilakukan oleh Mutiara Sari, Marselina & Neli Aida (2021), dengan judul "Perang Dagang AS - Cina: Dampak Ekonomi pada Negara Mitra Dagang AS-Cina". Jurnal Ekonomikawan: Jurnal Ilmu ekonomi dan Studi Pembangunan. Volume 21 No.2. Diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/455934-none-f82ea6cd.pdf>

⁴ Dikutip dari buku yang disusun Pusat Data dan Analisa Tempo (2019) dengan judul "Industri: Melihat Kesiapan Indonesia Memasuki Industri 4.0".

Dilihat dari tren data bulanan, capaian surplus perdagangan telah berlangsung selama 29 bulan berturut-turut sejak Mei 2019 sampai dengan September 2022 (BPS, 2022). Terkait kondisi tersebut, BI (2022)⁵ menilai bahwa surplus neraca perdagangan yang terjadi di Indonesia dapat memberi kontribusi positif dalam menjaga ketahanan ekonomi Indonesia dari kondisi eksternal.



Sumber: <https://www.bps.go.id/exim/>

Sedangkan menurut Febriz Kacaribu (2022)⁶, surplus neraca perdagangan yang sedemikian memperlihatkan kinerja positif pemerintah yang berhasil mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi dengan fokus perdagangan pada komoditas strategis. Tentunya kondisi tersebut perlu dipertahankan dalam rangka mitigasi dampak global terutama terhadap risiko perlambatan ekonomi Tiongkok dan Amerika Serikat yang memiliki pengaruh pada transaksi perdagangan internasional.

Di antara kerja keras dan kerja nyata yang dapat dilakukan pemerintah dalam jangka pendek adalah penetapan komoditas unggulan yang berorientasi ekspor, khususnya pada komoditas Nonmigas. Hal ini sejalan dengan perkembangan nilai total ekspor komoditas Nonmigas yang tumbuh positif secara konsisten, minimal sejak tahun 2020 yang mencapai USD53.945 juta. Kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi USD77,956.7 juta dan meningkat kembali pada tahun 2022 (sd Agustus) mencapai USD117,553.7 juta.

Secara lebih rinci pertumbuhan nilai ekspor atas komoditas utama Nonmigas selama tiga tahun terhitung Januari - Agustus (YoY) tahun 2020 sampai tahun 2022 untuk 5 (Lima) besar dapat dilihat pada tabel di samping berikut.

Jenis Komoditas Utama Nonmigas	Nilai FOB (juta US\$)		
	2020	2021	2022
Minyak Kelapa Sawit	10,784.5	18,624.9	19,367.6
Batu Bara	9,878.2	14,555.6	30,291.2
Besi/Baja	6,511.7	12,575.8	19,143.5
Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil	3,985.3	4,301.9	5,597.8
Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian	2,459.3	4,368.0	6,054.9
Komoditas lainnya	20,326.0	23,530.5	37,098.7

Sumber: BPS - Buletin Statistik Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara, Agustus 2021 dan 2022

Data yang tersajikan pada tabel di atas juga menjelaskan bahwa selama tiga tahun terakhir (2020-2022) masing-masing komoditas dengan urutan 5 terbesar dari 15 komoditas ekspor utama Nonmigas memiliki rata-rata kontribusi ekspor sebesar 20,92% untuk Batu Bara. Kemudian diikuti komoditas minyak kelapa sawit sebesar 20,12%, Besi/Baja 14,83%, pakaian jadi (konveksi) dari tekstil sebesar 5,89%, dan terakhir adalah jenis komoditas hasil pertanian berupa Kimia Dasar Organik dengan kontribusi sebesar 5,10%. Sedangkan khusus Batu Bara pada tahun 2022 menjadi komoditas terbesar kontibusinya dalam nilai ekspor Nonmigas.

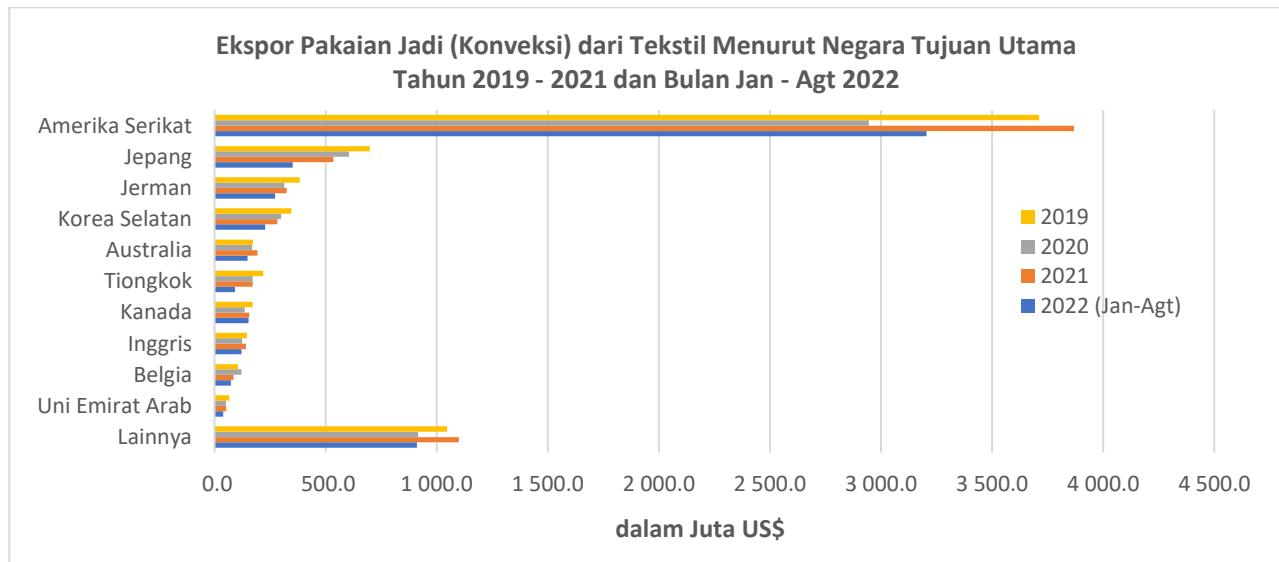
⁵ BI-Departemen Komunikasi (2022). "Surplus Neraca Perdagangan Berlanjut". Siaran Pers. Diakses dari https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2428322.aspx

⁶ Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/surplus-neraca-perdagangan>

Perkembangan positif atas ekspor komoditas TPT di atas juga disampaikan Kementerian Perindustrian (2022)⁷ dalam siaran pers yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekspor TPT mencapai 15,6% (yoY) pada triwulan III-2022. Tentunya capaian tersebut juga dihasilkan dari kontribusi para eksportir besar di tanah air yang diantaranya pada tahun 2021⁸ tercatat melakukan nilai ekspor sebesar USD629 juta oleh Pan Brothers Tbk, kemudian Indo-Rama Synthetics Tbk sebesar USD540 juta, dan Sri Rejeki Isman Tbk sebesar USD521 juta.

Berkaca dari kondisi yang tergambar pada tabel di atas, maka tidaklah keliru apabila Pemerintah dan DPR RI perlu memberikan perhatian khusus dalam pengembangan kegiatan ekspor pada komoditas Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil, dimana komoditas yang menjadi bagian dari industri strategis nasional ini memiliki tren positif dan konsisten mengalami peningkatan nilai ekspor. Selain itu, menurut Kementerian Perdagangan (2020)⁹ industri pakaian jadi dari tekstil bukan hanya menghasilkan devisa negara, namun juga tergolong industri padat karya yang secara paralel menjalankan fungsi ‘jaring pengaman sosial’ dari sisi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal padat karya, maka data BPS (2020)¹⁰ menunjukkan bahwa persentase serapan tenaga kerja pada industri pakaian jadi dan tekstil masing-masing memiliki proporsi rata-rata (2018-2020) adalah sebanyak 1,97% (kedua terbesar) dan 0,99% (keempat terbesar) dari 14,40% total proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur (24 industri manufaktur) secara nasional. Tentunya proporsi serapan tenaga kerja ini akan bertambah banyak bila dimasukkan tenaga kerja dari *home industry* untuk pakaian jadi maupun tekstil.

Pentingnya perhatian pada pengembangan industri pakaian jadi dari tekstil juga didasari dengan melihat potensi perluasan akses negara tujuan ekspor. Sebagaimana digambarkan pada grafik di bawah ini, nilai ekspor untuk komoditas pakaian jadi dari tekstil masih dapat terus dikembangkan ke berbagai negara selain ke Amerika Serikat dan Tiongkok, karena tren atas nilai ekspor mengalami peningkatan ke banyak negara lainnya, seperti Jerman, Australia, Kanada, dan Inggris.



Sumber: BPS - *Eksport-pakaian-jadi-konveksi-dari-tekstil-menurut-negara-tujuan-utama-2012-2021*, dan *Buletin Statistik-Perdagangan Luar Negeri Ekspor Menurut Kelompok Komoditi dan Negara*, periode Agustus 2022.

⁷ Diakses dari <https://kemenperin.go.id/artikel/23683/Tumbuh-4,83-Persen,-Sektor-Industri-Paling-Moncer-di-Triwulan-III-2022>

⁸ Diakses dari *Annual Report* Tahun 2021 dari masing-masing perusahaan yang dipublikasi pada <https://panbrotherstbk.com/>, <https://www.indorama.co.id/>, <https://www.sritex.co.id/>

⁹ Dikutip dari pernyataan Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kementerian Perdagangan dalam Siaran Pers dengan judul “Covid-19, Bukan Halangan Kemendag dan Pengusaha Tingkatkan Ekspor TPT, Khususnya Alat Kesehatan dari Tekstil”, Jakarta 24 Juni 2020.

¹⁰ Diolah dari data BPS mengenai persentase jumlah tenaga kerja (banyaknya orang yang bekerja minimal satu jam berturut-turut per hari baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar di sektor industri per semua sektor). Diakses dari <https://www.bps.go.id/indicator/9/1217/1/proporsi-tenaga-kerja-pada-sektor-industri-manufaktur.html>.

Terlebih lagi ketika komitmen pada tujuan perluasan pasar ekspor ke banyak negara tersebut juga telah dibuktikan Pemerintah Indonesia dengan realisasi belanja (rupiah murni) untuk Program Perdagangan Luar Negeri pada TA 2021 sebesar Rp496.193.245.998,00 dengan komposisi terbesar yakni 51,02% berupa Pengembangan Promosi dan Citra atau setara dengan Rp253.140.552.814,00. Begitupula realisasi untuk kegiatan Pengembangan Promosi Indonesia *Trade Promotion Center* (ITPC) sebesar Rp57.816.070.488,00 dan sebesar Rp27.283.118.660,00 untuk Peningkatan Peran dan Pemanfaatan Perundingan Perdagangan Internasional¹¹.

Problematika Pengembangan Ekspor Komoditas Pakaian Jadi dari Tekstil

Disebalik capaian meningkatnya nilai ekspor Nonmigas dari jenis pakaian jadi dari tekstil, timbul kendala atau hambatan yang dapat mempengaruhi pengembangan kinerja ekspor atas komoditas ini, di antaranya adalah ketergantungan pada impor bahan baku, rendahnya daya saing harga sejalan dengan diversifikasi dan *branding* produk yang belum optimal, dan teknologi pada mesin produksi yang relatif telah 'usang'.

Ketergantungan impor atas bahan baku merupakan masalah klasik yang dihadapi oleh industri tekstil di Indonesia, dimana data dari Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan (2021)¹² memperlihatkan bahwa selama kurun waktu lima tahun terakhir kinerja ekspor industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) di-supply 82,3 persen oleh impor bahan baku/penolong impor dengan dominasi berupa kain katun rajutan dan bukan rajutan, kain poliester dan kapas.

Sehingga tidak mengherankan bila Mohammad Faisal (2022)¹³ selaku Direktur Eksekutif CORE Indonesia mengingatkan Pemerintah agar secara konsisten menangani permasalahan ketergantungan impor bahan baku tekstil melalui penerapan *safeguard* bahan baku serta bahan baku penolong dalam negeri (lokal) dengan tujuan untuk memperkuat harmonisasi rantai pasok.

Terkait rendahnya daya saing harga produk industri pakaian jadi dari tekstil, timbul masalah yang mungkin sebagai akibat turunan dari langkah kontraproduktif yang dilakukan para pengusaha dalam melakukan efisiensi biaya produksi, yaitu 'ancaman' PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) kepada sejumlah pekerja di sektor industri tersebut. Kondisi ini menurut Adi Mahfudz Wuhadji (2022)¹⁴ dilakukan para pengusaha adalah dalam rangka mempertahankan keberlanjutan produksi yang tentunya dapat mempertahankan daya saing harga produk. Meskipun di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani (3 Maret 2022)¹⁵ dalam konferensi pers KSSK menjanjikan akan terus memonitor secara khusus fenomena PHK ini dengan mencari tahu secara detail sebabnya yang disertai koordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain untuk mengatasinya. Bahkan bila diperlukan dapat dibantu melalui kebijakan fiskal pemerintah ketika sebabnya adalah perlambatan kegiatan industri.

Sedangkan ditinjau dari akuntabilitas atas pengelolaan belanja dan tata niaga dalam peningkatan ekspor yang dilaksanakan Kementerian Perdagangan, BPK RI (2022)¹⁶ mengungkap adanya permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian pada aspek teknis maupun regulasi. Di antaranya merupakan dampak kebijakan atas Persetujuan Impor (PI) secara *online* melalui aplikasi Inatrade, dimana aplikasi tersebut belum terintegrasi dengan aplikasi surat rekomendasi pada kementerian teknis terkait, termasuk Kementerian Perindustrian. Sehingga dapat menghambat proses Verifikasi Kemampuan

¹¹ Laporan Keuangan Kementerian Perdagangan Tahun Anggaran (TA) 2021 (*audited*)

¹² Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/05/22/pemerintah-dorong-kemandirian-bahan-baku-industri-tekstil>

¹³ Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220606/257/1540390/industri-tekstil-ri-masih-dihantui-bahan-baku-impor>

¹⁴ Selaku Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Ketenagakerjaan sebagaimana pernyataannya yang diakses dari <https://investor.id/business/312040/kemenkeu-belum-ada-phk-massal-di-sektor-tpt>

¹⁵ Diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20221103152357-92-869109/sri-mulyani-sebut-ekspor-tekstil-melonjak-di-tengah-ancaman-phk-massal>

¹⁶ Diungkap dalam LHP-DTT pada Kementerian Perdagangan atas Tata Niaga Ekspor Impor dan Pengelolaan Belanja Dalam Peningkatan Ekspor Tahun 2019 s.d. 2021.

Industri (VKI) yang berdampak pada keterlambatan penerbitan PI yang akan dimanfaatkan para pelaku industri tekstil dalam memenuhi kebutuhan bahan baku impor tekstil dan produk tekstil.

Disisi lain, ketika Pemerintah berupaya memulihkan risiko kerugian industri TPT dalam negeri yang disebabkan dari lonjakan impor produk barang sejenis ataupun produk yang secara langsung bersaing di pasar melalui pemberlakuan pungutan negara berupa BMTP (Bea Masuk Tindakan Pengamanan) dan BMTPS (Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara) atas impor produk pakaian dan aksesoris pakaian, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya impor TPT yang dilaksanakan tanpa membayar BMTP dan BMTPS.

Selain itu, belum adanya harmonisasi dan sinkronisasi pada mekanisme PI antar Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang belum menetapkan dasar hukum atas mekanisme PI dalam rangka pengawasan importasi TPT yang dilakukan Kementerian Perdagangan, sehingga menyebabkan adanya realisasi impor produk TPT tanpa dokumen persetujuan impor. Dengan itu, tentunya menyisakan persoalan tersendiri yang tidak hanya dihadapi para eksportir namun juga turut dirasakan oleh importir.

Langkah Strategis Pengembangan Ekspor Komoditas Pakaian Jadi dari Tekstil

Berdasarkan pembahasan di atas, maka diperlukan pengawasan berkelanjutan dari DPR RI terhadap beberapa langkah strategis yang harus dilakukan Pemerintah dalam jangka pendek ataupun jangka panjang untuk memastikan kesinambungan kinerja positif ekspor yang difokuskan pada komoditas Nonmigas. Seperti untuk jangka pendek, selain penetapan komoditas unggulan yang berorientasi ekspor sebagaimana telah disebutkan di atas, perlu kiranya Pemerintah dalam hal ini perwakilan perdagangan agar memperkuat analisis pasar internasional dan meningkatkan diplomasi ekonomi ke berbagai negara tujuan ekspor dalam rangka memperluas akses pasar.

Tentunya langkah tersebut menjadi bukti keseriusan Pemerintah dalam diversifikasi negara tujuan ekspor dan mengurangi ketergantungan terhadap Tiongkok dan Amerika Serikat, terutama untuk komoditas pakaian jadi dari tekstil. Selain itu, diharapkan juga terbentuk penawaran produk ekspor tekstil dengan spesifikasi dan segmentasi tertentu yang eksklusif pada potensi permintaan yang berkesinambungan meskipun *market* relatif terbatas.

Peningkatan kinerja ekspor juga harus terus didorong melalui pengembangan alih teknologi dan penguatan vokasi dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang turut disertai dengan kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan memperhatikan kepentingan buruh seperti meminimalisir terjadi PHK sepihak yang dilakukan perusahaan, sehingga diharapkan adanya peningkatan produktivitas industri pakaian jadi sebagai kekuatan industrialisasi di Indonesia. Begitupun Pemerintah diharapkan mampu mendorong peningkatan daya saing produk melalui pengarusutamaan usaha kecil menengah (UKM) dalam mendorong berkembangnya *market place* berorientasi ekspor sekaligus mempercepat kebangkitan industri rumah tangga (*home industry*).

Tidak kalah penting dan menjadi langkah strategis serta prioritas dilakukan untuk jangka panjang adalah mendorong percepatan penggunaan bahan dasar industri tekstil dari dalam negeri dalam rangka peningkatan daya saing produk ekspor pakaian jadi. Apalagi kesadaran atas permasalahan ketergantungan impor bahan baku tekstil disadari Pemerintah sebagai sebuah tantangan sekaligus peluang yang telah dirancang penanganannya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2022 tentang Kebijakan Industri Nasional (KIN). Di antaranya dengan fasilitasi pemanfaatan teknologi *platform* berbasis 4.0 untuk industri garmen melalui konektivitas industri hulu-antara-hilir tekstil dalam rangka memperoleh akses bahan baku dari dalam negeri.

Beigitupun harmonisasi antar Kementerian/Lembaga terkait yang mengurus perizinan ekspor-impor adalah sebuah keharusan, sehingga dapat bersinergi mendukung industri pakaian jadi dari tekstil yang notabene berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Seperti jelasnya pemetaan kapasitas industri hulu dalam negeri dan menunjang penggunaan bahan baku lokal sesuai amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian disebabkan sistem pendataan dan pemetaan selama ini belum terintegrasi. Akibatnya, penyusunan kebijakan impor bahan baku tidak selalu sejalan dengan kapasitas industri hulu dalam negeri.